



Penerapan Form Permintaan Barang oleh Bagian Kasir Sebagai Instrumen Pengawasan dan Optimalisasi Realisasi Anggaran Perusahaan ABC

Dimas Rafi Parama Putra, Tituk Diah Widajantie*

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

Alamat: Jl. Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur.

Korespondensi: tituk.widajantie.ak@upnjatim.ac.id

Abstract. *This study aims to analyze the implementation of the Goods Request Form (FPB) by the cashier department as a tool for supervising and optimizing budget realization in Company ABC. The research employs a descriptive qualitative approach, with data collected through observation, interviews, and documentation. Data were analyzed thematically to identify patterns and relationships between the use of FPB and the effectiveness of budget supervision. The findings indicate that the use of FPB strengthens internal control, reduces procurement inefficiencies, and enhances transparency and accountability in corporate budget management. These results imply that integrating procurement procedures with internal control systems through FPB can serve as an effective strategy in financial management. Therefore, it is recommended that the company continue to develop and periodically evaluate FPB implementation to ensure alignment with budgetary and operational goals.*

Keywords: *Budget Realization, Budget Supervision, Efficiency, Goods Request Form, Internal Control*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Form Permintaan Barang (FPB) oleh bagian kasir sebagai instrumen pengawasan dan optimalisasi realisasi anggaran pada Perusahaan ABC. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola dan hubungan antara penggunaan FPB dengan efektivitas pengawasan anggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan FPB mampu memperkuat pengawasan internal, mengurangi pemborosan pengadaan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran perusahaan. Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa integrasi antara prosedur pengadaan barang dan sistem pengendalian internal melalui FPB dapat menjadi strategi efektif dalam manajemen keuangan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan disarankan untuk terus mengembangkan dan mengevaluasi implementasi FPB secara berkala guna memastikan kesesuaian dengan tujuan anggaran dan operasional.

Kata kunci: Efisiensi, Form Permintaan Barang, Pengawasan Anggaran, Pengendalian Internal, Realisasi Anggaran

LATAR BELAKANG

Fenomena yang terjadi pada berbagai perusahaan di Indonesia menunjukkan masih lemahnya disiplin anggaran dan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang maupun jasa. Berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2023, salah satu faktor utama yang menyebabkan ketidakefisienan penggunaan anggaran adalah kurang optimalnya sistem pengendalian internal, khususnya pada tahap permintaan dan pengadaan barang. Banyak perusahaan belum menerapkan mekanisme dokumentasi yang

Received September 25, 2025; Revised October 03, 2025; Accepted October 10, 2025

**Corresponding author, e-mail address*

memadai untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran telah sesuai dengan kebutuhan operasional dan prioritas anggaran yang telah direncanakan. Kondisi tersebut sering kali menimbulkan berbagai permasalahan, seperti keterlambatan proses pengadaan, pemborosan biaya, hingga ketidaksesuaian antara barang yang diminta dengan kebutuhan riil perusahaan. Oleh karena itu, penguatan sistem dokumentasi melalui penerapan Form Permintaan Barang (FPB) yang terintegrasi dengan mekanisme pengawasan anggaran menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, serta optimalisasi realisasi anggaran dalam konteks perusahaan di Indonesia.

Anggaran merupakan alat manajerial yang sangat penting dalam proses perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja suatu organisasi. Melalui penyusunan anggaran, perusahaan dapat menetapkan batasan alokasi dana untuk setiap kegiatan operasional guna mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan. Menurut Napitupulu, Sudarno, dan Junaedi (2021), realisasi anggaran memiliki fungsi kontrol manajerial yang signifikan dalam menjaga kinerja perusahaan agar tetap selaras dengan rencana yang telah ditentukan. Dalam konteks operasional, salah satu aspek penting dari pengendalian anggaran adalah adanya sistem dokumentasi permintaan barang yang efektif, terstruktur, dan terdokumentasi dengan baik.

Form Permintaan Barang (FPB) merupakan salah satu dokumen administratif yang berfungsi untuk mencatat, mengontrol, dan mengotorisasi kebutuhan pengadaan barang atau jasa dalam lingkungan perusahaan. Dalam praktiknya, FPB menjadi bagian dari mekanisme pengawasan internal yang berperan penting dalam mencegah penyalahgunaan anggaran serta memastikan bahwa seluruh proses pengadaan dilakukan secara efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebagaimana dikemukakan oleh Islami (2022), sistem pengadaan yang terintegrasi dengan kontrol internal yang kuat mampu memberikan jaminan bahwa seluruh pengeluaran perusahaan didasarkan pada kebutuhan yang riil dan telah melalui proses otorisasi yang sah.

Bagian kasir, sebagai unit yang terlibat langsung dalam proses pengeluaran dana, memiliki peran strategis dalam mendukung pengawasan dan realisasi anggaran. Oleh karena itu, penerapan FPB oleh bagian kasir tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai sarana akuntabilitas yang dapat meminimalkan pemborosan serta mengurangi risiko ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran. Menurut Jaelani (2021), sistem pengendalian pemesanan bahan baku yang

dilengkapi dengan kebijakan dokumen formal seperti FPB terbukti mampu meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran sekaligus memperkuat tata kelola keuangan perusahaan.

Selanjutnya, Darmeinis dan Widayanto (2022) menegaskan bahwa fungsi anggaran sebagai alat pengawasan biaya operasional harus ditunjang oleh sistem dokumentasi dan pelaporan yang andal. Dalam hal ini, FPB menjadi salah satu instrumen penting yang mendukung pengawasan secara real time terhadap arus keluar-masuk barang yang berpengaruh langsung terhadap realisasi anggaran. Hal ini sejalan dengan temuan Suryani, Syahrudin, dan Yohanes (2022) yang menyatakan bahwa pengendalian internal yang efektif, termasuk melalui dokumentasi permintaan barang, dapat meningkatkan efektivitas biaya serta akuntabilitas perusahaan secara menyeluruh.

Beberapa tahun terakhir, laporan audit internal pada sejumlah perusahaan manufaktur dan distribusi di Indonesia menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara anggaran yang telah direncanakan dengan realisasi aktual di lapangan, terutama dalam aspek pengadaan barang. Ketidaktertiban dalam dokumentasi permintaan barang sering kali mengakibatkan pemborosan anggaran hingga mencapai 15–20% dari total belanja operasional tahunan. Dalam beberapa kasus, lemahnya pengendalian dokumen menyebabkan terjadinya pengeluaran ganda atau pembelian barang yang tidak sesuai dengan prioritas kebutuhan perusahaan, sehingga berdampak negatif terhadap efisiensi operasional dan realisasi anggaran.

Dalam era modernisasi manajemen keuangan, integrasi antara sistem anggaran, pengendalian internal, dan sistem pengadaan menjadi fondasi penting dalam upaya meningkatkan efisiensi serta kinerja organisasi. Mustakim, Widyanti, dan Basuki (2023) menyatakan bahwa keberhasilan optimalisasi realisasi anggaran tidak hanya bergantung pada perencanaan yang matang, tetapi juga pada keberadaan sistem pengawasan yang sistematis, transparan, dan terstandarisasi. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji sejauh mana penerapan Form Permintaan Barang (FPB) oleh bagian kasir dapat berfungsi sebagai instrumen yang efektif dalam mendukung pengawasan serta optimalisasi realisasi anggaran pada lingkungan Perusahaan ABC.

KAJIAN TEORITIS

Form Permintaan Barang (FPB)

Form Permintaan Barang (FPB) merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem administrasi pengadaan barang di perusahaan, yang berfungsi tidak hanya sebagai media pencatatan dan pengajuan kebutuhan barang, tetapi juga sebagai alat pengawasan penggunaan anggaran. Menurut Islami (2022), penerapan sistem pengadaan barang yang dilengkapi dengan form permintaan serta mekanisme verifikasi berlapis dapat meminimalkan risiko kesalahan, penumpukan stok, dan potensi penyalahgunaan anggaran. Hal ini sejalan dengan temuan Jaelani (2021) yang menekankan pentingnya sistem pengendalian pemesanan bahan baku dan kebijakan terkait dalam memastikan efisiensi serta akuntabilitas penggunaan sumber daya perusahaan.

Dengan adanya FPB, setiap permintaan barang terdokumentasi secara sistematis, memungkinkan perusahaan melacak histori penggunaan, menilai frekuensi alokasi anggaran oleh masing-masing unit, serta memastikan kesesuaian dengan rencana kerja. Lebih lanjut, dokumen ini juga dapat menjadi salah satu bukti yang diperiksa dalam audit internal maupun eksternal, sehingga mendukung terciptanya pengendalian keuangan yang efektif dan terstruktur dalam perusahaan. Selain itu, FPB memiliki peran yang erat dengan pengelolaan anggaran dan kinerja perusahaan. Anggaran berfungsi sebagai alat pengawasan biaya operasional yang penting untuk mengendalikan pengeluaran dan meminimalkan pemborosan. Kuntadi dan Velayati (2022) menambahkan bahwa implementasi anggaran berbasis kinerja meningkatkan efektivitas pengawasan dan optimalisasi penggunaan sumber daya, sehingga setiap pengeluaran, termasuk permintaan melalui FPB, dapat dipertanggungjawabkan dan sejalan dengan tujuan strategis perusahaan.

Pengawasan Anggaran

Anggaran merupakan alat penting dalam manajemen keuangan yang digunakan untuk merencanakan serta mengontrol aktivitas keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu. Melalui penyusunan anggaran, perusahaan dapat menentukan alokasi dana untuk setiap program kerja atau operasional, sehingga seluruh aktivitas yang berjalan tetap dalam kendali dan sesuai target. Menurut Napitupulu, Sudarno, dan Junaedi (2021), pengawasan terhadap realisasi anggaran sangat diperlukan agar pelaksanaan kegiatan tidak menyimpang dari rencana awal dan tetap memberikan hasil yang optimal. Tanpa

adanya pengawasan yang memadai, anggaran yang disusun hanya akan menjadi dokumen formal tanpa pengaruh nyata terhadap efisiensi keuangan perusahaan.

Pengawasan anggaran dilakukan melalui berbagai cara, salah satunya adalah dengan membandingkan antara data realisasi dan data anggaran. Jika terdapat selisih atau deviasi yang signifikan, maka dapat dilakukan evaluasi terhadap proses pelaksanaan maupun sistem pengadaannya. Dalam hal ini, FPB berperan sebagai alat bantu pengawasan yang menghubungkan kebutuhan lapangan dengan persetujuan administratif, sehingga setiap pengeluaran memiliki dasar dokumentasi yang jelas. Sebagaimana ditegaskan oleh Darmeinis dan Widayanto (2022), efektivitas pengawasan anggaran sangat bergantung pada adanya dokumen pendukung yang mampu mencerminkan proses pengambilan keputusan dan mekanisme pertanggungjawaban keuangan.

Pengendalian Internal

Pengendalian internal merupakan sistem dan prosedur yang dirancang untuk memastikan kegiatan operasional perusahaan berjalan sesuai kebijakan yang telah ditetapkan, serta mencegah terjadinya kesalahan atau kecurangan yang dapat merugikan organisasi. Ilmi (2023) menjelaskan bahwa pengendalian internal yang efektif memberikan keyakinan memadai terhadap keandalan laporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Salah satu bentuk aktivitas pengendalian yang nyata adalah penggunaan Form Permintaan Barang (FPB) sebagai sarana otorisasi dan verifikasi permintaan pengeluaran barang. Dengan adanya FPB, perusahaan dapat mengatur alur permintaan secara formal, sehingga setiap pengeluaran memiliki dasar yang jelas dan dapat diaudit, mendukung terciptanya sistem pengendalian internal yang akuntabel.

Selain itu, FPB juga mendukung efisiensi penggunaan anggaran operasional dan pengelolaan sumber daya perusahaan. Nasution dan Atika (2023) menekankan bahwa anggaran biaya operasional berperan penting dalam meningkatkan efisiensi serta meminimalkan pemborosan. Dengan integrasi FPB dalam proses pengajuan barang, setiap permintaan dapat dipertanggungjawabkan sesuai alokasi anggaran dan rencana kerja, sehingga pengeluaran menjadi lebih transparan dan akuntabel. Penerapan FPB tidak hanya meningkatkan ketertiban administrasi keuangan, tetapi juga menjadi

instrumen penting dalam pengendalian internal dan pengawasan penggunaan anggaran secara efektif.

Optimalisasi Realisasi Anggaran

Optimalisasi realisasi anggaran merupakan upaya perusahaan untuk memaksimalkan pemanfaatan dana sesuai perencanaan yang telah ditetapkan tanpa menimbulkan pemborosan atau penyimpangan. Darmeinis dan Widayanto (2022) menjelaskan bahwa perusahaan yang tidak memiliki sistem pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran akan sulit mengukur efektivitas penggunaan dana. Nasution dan Atika (2023) menambahkan bahwa anggaran biaya operasional berperan penting dalam meningkatkan efisiensi serta mengurangi pemborosan. Dengan pengawasan yang tepat, perusahaan dapat memonitor penggunaan dana secara sistematis dan memastikan setiap pengeluaran sesuai dengan rencana kerja.

Selain pengawasan anggaran, pengendalian internal yang efektif juga berperan dalam memastikan kepatuhan prosedur dan akurasi data keuangan. Suryani, Syahrudin, dan Yohanes (2022) menjelaskan bahwa penerapan pengendalian internal yang baik, termasuk pencatatan dan verifikasi transaksi, dapat meminimalkan kesalahan maupun penyalahgunaan dana operasional. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk menjaga integritas laporan keuangan, mempermudah audit internal, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis informasi yang valid dan terpercaya.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai mekanisme penerapan Form Permintaan Barang (FPB) oleh bagian kasir sebagai bagian dari sistem pengawasan dan optimalisasi realisasi anggaran. Pendekatan ini digunakan untuk menggali fenomena secara kontekstual dan menggambarkan proses administratif yang terjadi di lingkungan kerja perusahaan secara alami, tanpa manipulasi variabel. Penelitian kualitatif deskriptif digunakan untuk memecahkan masalah yang bersifat aktual dengan cara mendeskripsikan keadaan objek berdasarkan fakta yang tampak sebagaimana adanya. Dengan demikian, pendekatan ini dianggap relevan untuk menilai efektivitas administratif dan fungsional dari FPB dalam pengelolaan anggaran.

Penelitian ini menekankan pada eksplorasi proses administratif yang dilakukan secara aktual oleh bagian kasir dalam mengelola dan memverifikasi FPB, serta bagaimana praktik tersebut berdampak pada efisiensi penggunaan anggaran perusahaan. Proses observasi dilakukan untuk memahami konteks kerja, sedangkan wawancara digunakan untuk menggali pengalaman, pemahaman, dan kebijakan yang diterapkan dalam praktik penerapan FPB. Model penelitian semacam ini juga digunakan oleh Jaelani (2021), yang mengevaluasi sistem pemesanan bahan baku pada perusahaan industri, dan menekankan pentingnya keterkaitan antara administrasi dokumen dan pengendalian pengeluaran.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui dua metode utama, yaitu wawancara dan observasi langsung. Wawancara dilakukan terhadap staf bagian accounting yang secara langsung terlibat dalam proses pemantauan FPB. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk memperoleh data subjektif mengenai prosedur, kendala, dan evaluasi terhadap penerapan FPB dalam pelaksanaan anggaran perusahaan. Metode wawancara memungkinkan peneliti memahami bagaimana kebijakan pengajuan barang diterapkan serta bagaimana peran kasir sebagai pengawas administratif dijalankan secara riil di lapangan.

Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui hasil wawancara dan observasi terhadap pelaksanaan FPB di bagian kasir Perusahaan ABC. Sumber data ini bersifat aktual dan memberikan gambaran riil tentang praktik pengendalian internal yang berlangsung di lapangan. Adapun data sekunder mencakup dokumen perusahaan seperti salinan FPB, SOP pengajuan barang, kebijakan penganggaran harian, serta laporan realisasi anggaran yang dianalisis untuk mendukung hasil temuan lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Strategis FPB dalam Proses Pengawasan

Form Permintaan Barang (FPB) memiliki peran strategis dalam sistem pengawasan anggaran perusahaan karena bertindak sebagai dokumen awal yang mengatur alur pengeluaran. Pada bagian kasir, FPB berfungsi sebagai alat kendali

administratif yang memastikan bahwa setiap permintaan telah melewati proses otorisasi yang sah sebelum dilakukan pengeluaran kas atau pembelian barang.

Prosedur ini menempatkan kasir tidak hanya sebagai pelaksana administratif, tetapi juga sebagai pengendali yang berperan penting dalam menyaring dan menyeleksi kebutuhan yang benar-benar dibutuhkan oleh masing-masing unit. Menurut Zahra, Junawan, dan Purba (2022), dokumen tanggung jawab keuangan seperti FPB dapat mencegah pengeluaran yang tidak terkendali dan memastikan bahwa penggunaan anggaran didasarkan pada evaluasi yang rasional dan bertanggung jawab. Seperti yang dikatakan oleh Ana (Staff accounting) pada hari Kamis 15 Mei 2025, sekitar pukul 09.30-09.46,

“Setiap pengajuan barang dari unit kerja tidak bisa langsung disetujui begitu saja. Masih harus disetujui oleh manager dan pimpinan. Saya sebagai bagian accounting bertugas mengecek kembali kelengkapan permintaan barang tersebut melalui Form Permintaan Barang (FPB) yang telah disetujui. Jadi, kalau tidak sesuai atau tidak penting, form tersebut bisa kembalikan untuk direvisi. Ini penting supaya anggaran yang dipakai benar-benar sesuai dan tidak ada pembelian yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa fungsi kasir dalam penerapan FPB tidak hanya sekadar administrasi teknis, tetapi juga sebagai garda awal dalam proses pengendalian keuangan perusahaan. Evaluasi yang dilakukan di tahap awal oleh pimpinan tersebut menjadi mekanisme filter yang efektif dalam menjaga agar realisasi anggaran tetap efisien dan bertanggung jawab.

Efektivitas FPB terhadap Realisasi Anggaran

Hasil wawancara dan dokumentasi menunjukkan bahwa keberadaan FPB secara signifikan memberikan kontribusi terhadap efektivitas realisasi anggaran perusahaan. Prosedur pengajuan yang sistematis dan terdokumentasi membuat perusahaan lebih mudah dalam memantau penggunaan anggaran secara periodik dan membandingkannya dengan alokasi awal. Selain itu, FPB juga memungkinkan pelacakan data historis dari setiap unit kerja, sehingga proses evaluasi realisasi anggaran dapat dilakukan secara lebih akurat dan objektif. Hal ini mendukung pernyataan Nasution dan Atika (2023) bahwa

dokumentasi anggaran operasional yang rapi dan terstruktur mampu meningkatkan efisiensi biaya dan mempercepat proses pengambilan keputusan.

Efektivitas tersebut juga ditunjukkan dari minimnya selisih antara anggaran yang direncanakan dengan realisasi di akhir periode. FPB membantu perusahaan melakukan penyesuaian alokasi dana berdasarkan data permintaan aktual yang masuk sepanjang waktu. Oleh karena itu, peran FPB tidak hanya sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai media evaluatif yang menghubungkan kebutuhan riil operasional dengan perencanaan keuangan. Hal ini menjadi bagian penting dalam menjaga kinerja anggaran tetap optimal, serta menghindari over-budgeting dan penggunaan dana yang tidak efisien oleh Napitupulu, Sudarno, dan Junaedi (2021). Seperti yang dikatakan oleh Ana (Staff accounting) pada hari Kamis 15 Mei 2025, sekitar pukul 09.50-09.58,

“Selama ini, FPB sangat membantu kami dalam mengontrol anggaran yang digunakan oleh tiap unit kerja. Kami bisa tahu barang apa saja yang diminta, berapa kali diajukan, dan apakah memang sesuai dengan rencana awal anggaran. Dari situ, kami bisa evaluasi kalau ada unit yang pengeluarannya sering melebihi anggaran atau tidak sesuai prioritas. Jadi, FPB ini semacam alat bantu untuk menyeimbangkan kebutuhan lapangan dengan anggaran yang tersedia.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa FPB menjadi instrumen penting yang tidak hanya mendukung kelancaran proses administrasi pengeluaran, tetapi juga memperkuat fungsi evaluasi dan pengendalian anggaran secara berkelanjutan.

Integrasi dengan Sistem Pengadaan

Salah satu kekuatan utama dari FPB adalah kemampuannya untuk diintegrasikan dengan sistem pengadaan barang dan pencatatan keuangan internal perusahaan. Integrasi ini memungkinkan proses permintaan barang menjadi satu kesatuan dengan alur persetujuan dan pembayaran, sehingga risiko duplikasi pengajuan atau keterlambatan pencatatan dapat diminimalkan. Dalam penelitian ini, integrasi antara FPB dan sistem pengadaan yang terkomputerisasi terbukti mampu meningkatkan efisiensi administratif, serta memberikan data yang lebih akurat untuk proses pelaporan dan audit internal. Menurut Riyanto (2022), sistem reviu dokumen pengadaan merupakan langkah strategis untuk mencegah inkonsistensi antara dokumen pengajuan dengan realisasi yang terjadi di lapangan.

Proses integrasi ini juga meningkatkan efektivitas kontrol manajemen dalam memastikan bahwa barang yang dibeli sesuai dengan kebutuhan dan standar kualitas yang ditetapkan. Seluruh permintaan yang telah disetujui melalui FPB secara otomatis tercatat dalam sistem pengadaan, sehingga dapat dipantau statusnya secara real-time. Hal ini sangat penting dalam konteks akuntabilitas dan keterbukaan informasi keuangan internal perusahaan. Praktik semacam ini sejalan dengan prinsip transparansi yang menjadi bagian dari tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Seperti yang dikatakan oleh Ana (*Staff accounting*) pada hari Kamis 15 Mei 2025, sekitar pukul 10.03-10.12,

“Bagian kasir sangat terbantu dengan integrasi FPB ke dalam sistem pengadaan dan pencatatan. Begitu permintaan barang disetujui, datanya langsung masuk ke sistem. Jadi tidak perlu input ulang, dan bisa langsung dilacak. Jadi, pemohon sekarang bisa langsung lihat status pengajuan sampai pembeliannya. Ini bikin kerjaan lebih cepat dan data juga lebih rapi buat audit.”

Pernyataan tersebut menguatkan bahwa penerapan FPB yang terintegrasi dengan sistem pengadaan dan keuangan internal perusahaan membawa manfaat tidak hanya dari sisi efisiensi kerja, tetapi juga dari sisi pengawasan, transparansi, serta akurasi data keuangan dan logistik perusahaan secara menyeluruh.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan Form Permintaan Barang (FPB) oleh bagian kasir di Perusahaan ABC memiliki peranan penting dalam memperkuat sistem pengawasan internal dan mengoptimalkan realisasi anggaran perusahaan. FPB menjadi dokumen pengendali utama yang tidak hanya mencatat permintaan barang, tetapi juga memastikan bahwa setiap pengajuan telah melalui proses verifikasi dan sesuai dengan rencana anggaran yang ditetapkan. Melalui sistem FPB yang terstruktur, perusahaan dapat menekan potensi penyimpangan, menghindari pemborosan, dan menjaga agar pengeluaran tetap selaras dengan alokasi yang telah direncanakan. Selain itu, FPB juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta tertib administrasi dalam pelaksanaan kebijakan keuangan dari Zahra, Junawan, dan Purba (2022).

Berdasarkan kesimpulan tersebut, perusahaan disarankan untuk mengembangkan sistem FPB berbasis digital agar proses pengajuan dan persetujuan barang dapat

dilakukan secara lebih cepat, efisien, dan terdokumentasi secara otomatis. Digitalisasi FPB juga akan memudahkan proses integrasi dengan sistem keuangan dan pelaporan anggaran yang sudah ada. Selanjutnya, perlu dilakukan pelatihan rutin bagi staf kasir maupun unit terkait untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan standar operasional yang telah ditetapkan. Evaluasi berkala terhadap efektivitas penggunaan FPB juga sangat diperlukan guna mengidentifikasi potensi kelemahan dalam implementasi dan memastikan adanya perbaikan berkelanjutan. Dukungan dari manajemen puncak serta keterlibatan aktif tim audit internal akan sangat berperan dalam menjaga keberlangsungan dan efektivitas FPB sebagai instrumen pengawasan dan pengendalian anggaran yang andal di masa mendatang.

DAFTAR REFERENSI

- Darmeinis, & Widayanto, A. (2022). Peran anggaran sebagai alat pengawasan biaya operasional PT Pelayaran Nasional Samudera Raya Jakarta. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi*, 2(1), 107. <https://doi.org/10.55606/jurimea.v2i1.107>
- Ilmi, M. (2023). Pengaruh audit operasional dan pengendalian internal terhadap kinerja perusahaan. *Jurnal Akuntansi*, 17(1), 99–110. <https://doi.org/10.37058/jak.v17i1.6741>
- Islami, V. H. (2022). Analisis sistem pengadaan barang dalam rangka sistem pengendalian intern (Studi kasus: PT Lintas Nusantara Perdana). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 2(1), 12–21. <https://doi.org/10.31294/jab.v2i1.1148>
- Jaelani, D. (2021). Sistem pengendalian pemesanan bahan baku susu bubuk serta kebijakannya. *Industri: Jurnal Teknologi dan Manajemen Industri*, 5(1), 23–32. <https://doi.org/10.37090/indstrk.v5i1.355>
- Kuntadi, C., & Velayati, E. (2022). Faktor-faktor yang memengaruhi implementasi anggaran berbasis kinerja. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 5(4), 321–330. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i4.2830>
- Mustakim, M., Widyanti, R., & Basuki, B. (2023). Pengaruh perencanaan anggaran dan ketersediaan anggaran kas terhadap optimalisasi realisasi penyerapan anggaran pada pemerintah daerah Kabupaten Balangan. *Al-Ulum: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 9(1), 67–78. <https://doi.org/10.31602/alsh.v9i1.10988>
- Napitupulu, B., Sudarno, & Junaedi, A. T. (2021). Budget realization as a management control tool for company performance at PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Pekanbaru Branch. *Jurnal Akuntansi, Bisnis dan Teknologi*, 2(3), 81. <https://doi.org/10.35145/jabt.v2i3.81>
- Nasution, I. R., & Atika, D. (2023). Peranan anggaran biaya operasional dalam meningkatkan efisiensi pada PT. Sop Sumsum Langsa. *Worksheet*, 2(2), 123–132. <https://doi.org/10.46576/wjs.v2i2.3455>
- Riyanto, W. (2022). Identifikasi permasalahan dan rekomendasi tindak lanjut pada tahap reviu dokumen persiapan pengadaan barang/jasa pemerintah: Studi kasus: Paket

- pengadaan barang/jasa pemerintah di Pemerintah Kota Yogyakarta semester I tahun anggaran 2022. *Jurnal Pengadaan Barang Dan Jasa*, 1(2), 86–96.
<https://doi.org/10.55961/jpbj.v1i2.21>
- Suryani, I. L., Syahrudin, M., & Yohanes, F. A. (2022). Pengaruh pengendalian intern terhadap efektivitas biaya perjalanan dinas. *Akuntabilitas*, 15(2), 158–170.
<https://doi.org/10.15408/akt.v15i2.28659>
- Zahra, U., Junawan, & Purba, R. B. (2022). An application of responsibility accounting with the budget as a cost control tool at PT. Hearlife Indonesia. *Britain International of Humanities and Social Sciences (BIOHS) Journal*, 4(3), 780.
<https://doi.org/10.33258/biohs.v4i3.780>